



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

**UNIT KERJA :
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGENG PURNOMO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **497699**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 360.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/125 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/213 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.664 m2/1.664 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 182.460.000**

1. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 460.000
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO 004 1,5E MT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 3.100.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 38.485.242**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 584.045.242**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 584.045.242

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.